

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Perencanaan Konstruksi

Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang terdiri dari :

1. Survei.
2. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
3. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
4. Penelitian.

Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu konsultan dan designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.

b. Pelaksanaan Konstruksi

Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

c. Pengawasan Konstruksi

Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi di atas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/ berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar maka pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi yaitu PT. Utama Karya.

PT Utama Karya (Persero), awalnya merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda dengan nama "*Hollandsche Beton Maatschappij*". Kemudian, pada 1961, Perseroan dinasionalisasi dengan PN Utama Karya melalui Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 61.1961 Tanggal 29 Maret 1961. Sejak fase transformasi ini, PN. Utama Karya telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti Gedung DPR/MPR RI dan Monumen Patung Pancoran.

Di saat konstruksi mengenal teknologi beton pra tekan di Indonesia, PN. Utama Karya telah mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai bentuk profesionalisme terhadap teknologi ini, PN. Utama Karya membentuk divisi khusus prategang. Pada dekade ini Utama Karya berubah status menjadi PT. Utama Karya (Persero).

Status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. DU/MK.136/KPTS/03/2009

tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan hari ulang tahun PT. Utama Karya. Melalui Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan tersebut, tanggal 29 Maret ditetapkan sebagai hari ulang tahun perseroan.

Dalam mengoptimalkan pencapaian usaha perseroan yang lebih signifikan serta menjawab peluang usaha di industri konstruksi, PT Utama Karya mendirikan anak perusahaan PT Utama Karya Infrastruktur (PT HKI) pada 15 Mei 2015. Ruang lingkup bidang usaha yang dijalankan oleh PT HKI meliputi industri material bangunan, pekerjaan pelaksana konstruksi, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen dan rekayasa industri, pabrikasi bahan dan komponen bangunan dan lain sebagainya.

Hutama Karya memiliki makna “Karya Luhur dan Bermutu”. Dengan mengemban makna tersebut, Perseroan menjalankan kinerja dan menghasilkan karya-karya monumental dan iconic.

1.1.1. Visi dan Misi

1. Visi : Menjadi perusahaan industri konstruksi yang handal dan terkemuka.
2. Misi : Meningkatkan nilai perusahaan di bidang industri konstruksi secara profesional dalam memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).

1.1.2. Strategi Perusahaan PT. Utama Karya

Pada saat ini HK sudah memasuki tahap awal proses transformasi dengan melakukan persiapan dan tahap awal restrukturisasi perusahaan. HK sudah memulai memfokuskan operasional usaha pada perusahaan jalan tol dan unit bisnis jasa konstruksi sebagai pendukungnya. Disamping memprioritaskan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), HK juga fokus pada peningkatan kapasitas bisnis jasa konstruksi dan manufaktur khususnya produk aspal dan beton.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Industri jasa konstruksi mendapat sorotan banyak pihak di berbagai negara, mengingat sumbangsuhnya yang signifikan terhadap banyak sektor terutama ekonomi. Suatu pencapaian yang harus didukung oleh infrastruktur yang baik secara fisik maupun dari sisi sumber daya manusianya. Seperti halnya pada industri lain,

pasar jasa konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat dan pemerintah, dimana daya beli ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang mengalami gangguan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pada pertengahan tahun tersebut terjadi krisis moneter. Industri jasa konstruksi mengalami goncangan yang sangat hebat.

Dalam kurun waktu tersebut perusahaan – perusahaan jasa konstruksi sangat terpuak pada saat terjadinya krisis ekonomi karena volume pekerjaan konstruksi berkurang drastis, proyek ditangguhkan atau dihentikan sementara oleh pemiliknya dan juga pemilik proyek banyak yang kesulitan melakukan pembayaran kepada kontraktor. Sementara dalam waktu yang bersamaan, kontraktor memiliki kewajiban membayar kepada pihak ketiga, terutama pengusaha golongan ekonomi lemah, disamping harus membayar bunga pinjaman kepada pihak perbankan.

Adanya krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis tersebut terus merambat ke sektor riil dan non-keuangan di seluruh dunia. Pergerakan kurs dollar terhadap rupiah nyaris menembus Rp. 10.000, pasar properti di semester pertama 2009 berjalan lambat. Itupun hanya di level menengah ke atas baik residential, apartement dan commercial area. Konsumen akan melihat tingkat suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Aset (KPA). Yang paling dikhawatirkan adalah untuk level menengah kebawah yaitu Rumah Sederhana Sehat (RSHat).

Kaitannya, karena RSHat hingga saat ini masih disubsidi oleh pemerintah. Besaran subsidi RSHat sudah mencapai Rp. 729,50 miliar yaitu untuk 88.807 unit RSHat. Bila kurs menembus level Rp. 10.000, maka sudah dipastikan cadangan devisa Indonesia akan semakin berkurang. Hal ini akan berdampak tidak baik terhadap besaran subsidi RSHat. Di samping itu, daya beli masyarakat kecilpun akan semakin berkurang. Berbeda dengan dampak yang dirasakan akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997 – 1998. Banyak proyek properti yang berhenti seketika. Akibatnya, ketika itu terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Industri properti termasuk salah satu bisnis yang pertama terkena krisis sebagian besar pembiayaannya mengandalkan pinjaman dari perbankan nasional dan utang dari lembaga keuangan di luar negeri.

Menurunnya tingkat suku bunga deposito perbankan dari tahun ke tahun mendorong masyarakat untuk bergerak ke sektor riil untuk berinvestasi, terutama ke sektor properti. Demikian juga halnya dengan adanya peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) rakyat Indonesia yang berarti suatu refleksi mulai pulihnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan terhadap produk – produk konstruksi seperti misalnya perumahan, perkantoran dan sebagainya. Perbaikan indikator ekonomi di Indonesia membuka peluang bagi industri jasa konstruksi untuk berkembang pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain perkembangan pasar industri konstruksi tidak saja hanya dipengaruhi oleh sektor ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan penerapan otonomi daerah pada tahun 2000 menyebabkan beralihnya pengelolaan proyek – proyek dari pusat ke daerah – daerah. Konsumen yang tadinya terkonsentrasi di Jakarta menjadi terbagi-bagi ke daerah – daerah. Selain otonomi daerah, saat ini kontraktor nasional juga dihadapkan dengan era globalisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003 yang menyebabkan kontraktor – kontraktor asing dapat dengan bebas ikut bersaing memperebutkan proyek-proyek pada pasar konstruksi di Indonesia. Dengan masuknya kontraktor – kontraktor asing tersebut di tengah belum pulihnya kondisi pasar industri konstruksi saat ini, tentunya akan menyebabkan semakin ketatnya persaingan di antara pelaku bisnis konstruksi di Indonesia.

Di tengah ketatnya kondisi persaingan industri jasa konstruksi di Indonesia, para pelaku bisnis mulai dari kontraktor swasta maupun BUMN berupaya keras untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan merupakan organisasi yang mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya walaupun tidak menutup kemungkinan mengharapkan kemakmuran sebagai tujuan lainnya (Gitosudarmo, 2002:5). BUMN adalah perusahaan yang diciptakan dan dibangun oleh negara untuk kepentingan rakyat dan negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha dan koperasi. BUMN diharapkan dapat mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi.

BUMN sengaja diciptakan negara sebagai usaha dan strategi untuk dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan pokok rakyat dan negara begitu juga dengan kestabilan harga-harganya. Maka BUMN memiliki peran yang sangat strategis dengan keberadaan dan fungsinya. Suatu perusahaan yang dapat bersaing antara lain ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Kinerja perusahaan BUMN pun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan serta belum mampu untuk berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor / perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Perusahaan yang tidak dapat bersaing dalam mempertahankan kinerjanya, maka akan tergusur dari lingkungan industrinya dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan/pailit. Pada tesis ini penulis memilih untuk meneliti pada perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yaitu PT. Hutama Karya yang telah melakukan akuisisi PT. Istaka Karya yang telah dijatuhi vonis pailit.

Pada tanggal 22 Maret 2011 Kementerian BUMN menyetujui keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Jakarta, yaitu menjatuhkan vonis pailit pada PT Istaka Karya. PT Istaka Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Pailitnya Istaka Karya, bermula dari utang yang berbentuk Commercial Paper (CP) kepada PT. Japan Asian Investment Company (JAIC) sekitar USD 7,64 juta. CP tersebut adalah utang atas tunjukkan, bukan utang atas nama. Untuk CP yang diterbitkan pada Desember 1998, yang jatuh temponya 1 Januari 1999 merupakan CP tangan keempat. Selanjutnya, PT JAIC mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya karena perusahaan pemerintah ini dianggap tidak melaksanakan putusan MA yang memerintahkan perusahaan itu membayar kewajibannya sebesar USD 7,64 juta. MA mengabulkan kasasi yang dilayangkan PT JAIC tersebut dalam perkara permohonan pailit. Proses pemailitan PT Istaka Karya berlangsung alot, bahkan dihiasi demonstrasi oleh sekitar 300 orang mengatasnamakan Forum Kreditur Konkuren Istaka Karya (FKKI).

Seluruh karyawan PT Istaka Karya, tentu saja sangat resah dengan kepailitan perusahaan tempatnya bekerja. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan untuk mencari langkah perdamaian terbaik, akhirnya kepailitan Istaka Karya pun dibatalkan. Salah satu kesepakatan penting yang dicapai, utang perseroan dikonversi

menjadi saham dan sebagian lagi dibayarkan. Perdamaian tersebut terjadi pada 9 Desember 2011. Setelah dinyatakan PT Istaka Karya untuk tidak jadi pailit, BUMN ini akan menjalankan beberapa proyek yang sempat tertunda yang diakibatkan persoalan kepailitan tersebut dan bahkan menargetkan memperoleh laba bersih di tahun 2012.

Penurunan pendapatan serta laba yang dialami oleh PT. Istaka Karya tahun 2008 – 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Laba (Rugi) Bersih PT. Istaka Karya Periode 2008-2013

Tahun	Pendapatan Usaha (Rp Juta)	Laba (Rugi) Bersih (Rp Juta)	Sumber	Status
2008	523.987	15.563	Audited	KS
2009	608.271	17.083	-	(tidak ada status kesehatan)
2010	406.225	2.001	Unaudited	(tidak ada status kesehatan)
2011	406.225	2.001	Unaudited 2010	S
2012	406.225	2.001	Unaudited 2010	(tidak ada status kesehatan)
2013	12.482	170	Unaudited 2013	(tidak ada status kesehatan)

(sumber: Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan PT. Istaka Karya menurun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Kondisi ini dimana PT Istaka Karya sudah tidak memiliki kemampuan bayar terhadap kewajibannya (hutang). Bahkan di tahun 2011 dan di tahun 2012, perusahaan tidak mengeluarkan laporan keuangan tahunannya sehingga Kementerian BUMN Republik Indonesia masih memakai Laporan Keuangan tahun 2010. Dari kasus keputusan pailit yang dijatuhkan ke PT. Istaka Karya ini, Pemerintah tidak mau menyuntikkan modal untuk menyelamatkan PT Istaka Karya (Persero) dari kepailitan. Pertimbangannya, Pemerintah tak mau uang negara terbuang percuma dan akan semakin membebani anggaran negara.

Adanya rencana Kementerian BUMN yang akan menjadikan PT Utama Karya (Persero) sebagai perusahaan yang khusus menangani jalan tol. Utama Karya

yang sebelumnya bergerak pada jasa konstruksi namun akan diubah menjadi khusus menangani jalan tol agar segera bisa menggarap proyek jalan Tol Trans Sumatera yang membentang dari Lampung hingga Banda Aceh. Dengan perubahannya tersebut, proyek pembangunan selain jalan tol akan dilakukan pengerjaannya oleh anak usaha Utama Karya. Untuk menyukseskan proses perubahan tersebut, Utama Karya akan mengakuisisi Istaka Karya sebagai anak perusahaan yang baru. Dengan akuisisi tersebut kapasitas Utama Karya dalam mengerjakan proyek jalan tol sudah masuk dalam kategori tujuh atau perusahaan yang sudah boleh menggarap proyek bernilai besar. Pada Oktober 2013, PT Utama Karya resmi memiliki PT Istaka Karya sebagai anak usaha menyusul rencana mempertahankan bisnis jasa konstruksi perseroan.

Dengan Utama Karya mengakuisisi PT Istaka Karya sebagai anak perusahaannya, akuisisi dilakukan dengan harapan mendatangkan sejumlah keuntungan. Kondisi saling menguntungkan akan terjadi bila kegiatan akuisisi tersebut memperoleh sinergi.

Menurut Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa sinergi adalah keadaan dimana dua buah perusahaan yaitu masing-masing perusahaan A dan perusahaan B bergabung menjadi satu perusahaan C, dan dalam penggabungan ini nilai perusahaan C menjadi lebih tinggi dari nilai perusahaan A dan perusahaan B bila berdiri sendiri, hal inilah yang dinamakan sinergi. Pengaruh sinergi sendiri akan timbul dalam empat sumber:

1. Penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis manajemen, pemasaran, produksi atau distribusi.
2. Penghematan keuangan, yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh analisis sekuritas.
3. Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lebih lemah akan lebih produktif setelah merger.
4. Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya pesaing.

Sebagai akibat dari sinergi perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat diketahui antara lain dari hasil analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan dipakai sebagai salah satu penentu kebijakan bagi manajer untuk meningkatkan kinerjanya, bagi kreditor untuk

mengevaluasi kemungkinan diberikannya pinjaman, bagi pemegang saham untuk meramalkan laba, dividen dan harga saham dan bagi investor untuk penentuan kebijakan penanaman modalnya (Prastowo dan Rifka 2002:56).

Keputusan akuisisi selain membawa manfaat tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya biaya – biaya untuk melaksanakan akuisisi yang mahal, dan hasilnya pun belum pasti sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Todeva dan Knoke (2005) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan bagi pihak yang tidak menyetujui terjadinya akuisisi, yaitu :

1. Jika perusahaan yang diakuisisi berada dalam kondisi yang baik, maka *goodwill* akan menjadi mahal.
2. Adanya perbedaan budaya pada kedua perusahaan menyebabkan kedua perusahaan membutuhkan waktu untuk mensinkronkan perbedaannya, baik dalam etos kerja, nilai - nilai, dan komitmen sehingga perlu dilakukan proses integrasi budaya.
3. Bagi masyarakat, adanya akuisisi akan mengurangi persaingan dan makin sedikit pilihan yang tersedia bagi konsumen, terlebih pada saat munculnya kondisi pasar oligopoli. Artinya, situasi ini menjadi buruk bagi konsumen namun memberikan dampak positif bagi perusahaan *acquirer*.
4. Bagi karyawan, akan muncul ketakutan terhadap pengurangan jumlah karyawan sebagian dampak dari efisiensi yang mungkin dilakukan oleh manajemen dan pemilik baru.
5. Dalam beberapa kasus, terjadinya akuisisi akan mengurangi motivasi pada karyawan target *firm*.

Disamping itu juga, pelaksanaan akuisisi dapat memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan dari perusahaan yang mengakuisisi (*acquiring company*). Menurut Kamaludin, Karona dan Berto (2015) menyatakan bahwa akuisisi sering dilakukan untuk menggantikan status hutang menjadi ekuitas. *Leverage* atau hutang yang tinggi akan menyebabkan keuntungan menjadi lebih tinggi jika keadaan berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan bencana kegagalan jika keadaan menjadi tidak menguntungkan, misalnya perusahaan tidak dapat mengoptimalkan aktivitas operasionalnya pada masa resesi atau terjadi penurunan kinerja ekonomi secara umum.

Meskipun akuisisi memiliki tujuan yang baik bagi *acquirer* ataupun *target firm*, terkadang tetap memerlukan upaya yang hati – hati bagi manajemen dan pemegang saham. Maka dari itu, perlu adanya sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kondisi keuangan BUMN serta memantau kinerja keuangan BUMN agar dapat mengambil atau membuat kebijakan untuk mencegah kondisi yang lebih buruk. Harapannya sebagai salah satu alat bantu bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan BUMN dan pelaporan investasi pemerintah. Tingkat kesehatan perusahaan menjadi penting karena menjadi salah satu untuk mengukur atau memantau sejauh mana perusahaan menjaga kelancaran operasi perusahaan agar tidak terganggu serta kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Analisis kondisi keuangan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan dari peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut ditemukan, semakin baik bagi pihak manajemen, karena dapat melakukan perbaikan sejak awal (Hanafi, 2003:263). Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan munculnya kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari indikator kinerja yakni apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan jangka pendek (likuiditas) yang tidak segera diatasi akan mengakibatkan kesulitan keuangan jangka panjang (solvabilitas) sehingga dapat berujung pada kebangkrutan suatu perusahaan (Suharman, 2007). Untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan menggunakan teknik-teknik analisis laporan keuangan.

Menurut Hery (2015:3) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya (Hery, 2015:132). Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam

industri yang sama. Hal ini berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi perusahaan telah berjalan.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu metode untuk membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan serta kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan dan kemudian membuat keputusan untuk menentukan langkah – langkah yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Penilaian tingkat kesehatan BUMN di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Dari SK tersebut dapat diketahui bahwa penilaian kesehatan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sementara itu penilaian kesehatan perusahaan telah banyak dilakukan di antaranya seperti Altman (1968, 1984, 2000), Deakin (1972), Blum (1974), Springate (1978), Ohlson (1980), Haim (1982), Edmister (1983), Zavgren (1983), Zmijewski (1983) dan Grover (2003). Semua model tersebut diciptakan dengan menggunakan sampel perusahaan di barat.

Penelitian mengenai penilaian kondisi keuangan perusahaan dilakukan oleh Altman (1968) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Altman menggunakan *multiple discriminant analysis* untuk menguji manfaat 5 (lima) rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan. Kelima rasio keuangan tersebut adalah *working capital to total assets*, *retained earnings to total assets*, *earnings before interest taxes to total assets*, *market value of equity to book value of total debts*, dan *sales to total assets*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan kekuatan prediksi rasio – rasio keuangan untuk periode waktu yang lama. Altman juga menemukan bahwa rasio – rasio tertentu terutama likuiditas dan *leverage* memberikan sumbangan terbesar dalam mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dan beliau yang memunculkan formula Z-score untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan.

Model Springate diperkenalkan oleh Gordon L.V. Springate pada tahun 1978 yang merupakan pengembangan dari model Altman dan model ini dikembangkan dengan Multiple Discriminant Analysis (MDA). Pada awalnya, pada model ini menggunakan 19 rasio keuangan yang populer tetapi setelah melakukan pengujian akhirnya Springate memilih 4 rasio yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan termasuk perusahaan yang sehat atau bangkrut. Model ini memiliki

keakuratan 92,50% dengan menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel yang digunakan oleh Springate.

Model Zmijewski diperkenalkan pada tahun 1984. Model ini menggunakan analisa rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu.

Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-Score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 1968, dengan menambahkan tiga belas rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996. Penelitian mengenai alat deteksi kebangkrutan telah banyak dilakukan sehingga memunculkan berbagai model prediksi kebangkrutan yang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perusahaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan.

Penelitian tentang model prediksi financial distress yang membandingkan antara model analisis Indonesia dan model analisis barat salah satunya dilakukan oleh Vaya Juliana Dillak (2011) dengan menganalisis kesehatan perusahaan yang melakukan perbandingan menggunakan Kepmen BUMN No. 100/MBU/2002 dan Metode Altman Z-Score dengan studi kasus pada perusahaan BUMN Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan mana yang dapat dikatakan aman apakah menggunakan model Altman, model Springate, model Zmijewski, model Grover atau menurut Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kondisi Keuangan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT. Utama Karya Mengakuisisi PT. Istaka Karya)**”

1.3. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi keuangan PT. Utama Karya sebelum melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2011 – 2012 dengan menggunakan model Altman, model

- Springate, model Zmijewski, model Grover dan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002?
2. Bagaimanakah kondisi keuangan PT. Utama Karya sesudah melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2014 – 2015 dengan menggunakan model Altman, model Springate, model Zmijewski, model Grover dan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002?
 3. Apakah terdapat perbedaan analisis kondisi keuangan PT. Utama Karya sebelum melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2011 – 2012 dan dan sesudah melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2014 – 2015 antara :
 - a. Model Altman dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - b. Model Springate dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - c. Model Zmijewski dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - d. Model Grover dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan PT. Utama Karya sebelum melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2011 – 2012 dengan menggunakan model Altman, model Springate, model Zmijewski, model Grover dan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002.
2. Untuk mengetahui kondisi keuangan PT. Utama Karya sesudah melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2014 – 2015 dengan menggunakan model Altman, model Springate, model Zmijewski, model Grover dan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan analisis kondisi keuangan PT. Utama Karya sebelum melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2011 – 2012 dan sesudah melakukan akuisisi PT. Istaka Karya tahun 2014 – 2015 antara :
 - a. Model Altman dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - b. Model Springate dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - c. Model Zmijewski dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 - d. Model Grover dengan Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002

1.5. Kegunaan Penelitian

Setelah dilaksanakan dan dianalisis hasilnya, penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dan penilaian mengenai tingkat kesehatan perusahaan serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Bagi investor saham atau obligasi, sebagai masukan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam menginvestasikan uangnya dan untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut.
3. Bagi kreditor, untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.
4. Bagi Pemerintah, untuk mengawasi jalannya usaha yang berada dibawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut.
5. Bagi penulis, sebagai sarana penulis untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penilaian kesehatan perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika untuk masing – masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, operasional variabel, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian, teknik analisis yang digunakan dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan analisa data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memaparkan kesimpulan akhir penelitian serta saran-saran untuk objek penelitian ataupun pihak-pihak terkait lainnya.